



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 15/ORT.7-Kpt/7602/2022
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi maka perlu membuat program kegiatan reformasi birokrasi;

b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara dan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju berkewajiban menyusun rencana aksi reformasi birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07.Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 14/ORT.1-Kpt/7602/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Kabupaten Mamuju Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 09 Februari 2022

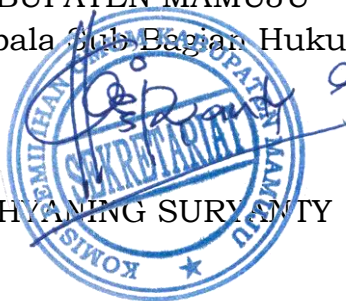
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Hukum,

CAHYANING SURYANTY



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 15/ORT.7-Kpt/7602/20212
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022

RENCANA AKSI REFORMASI BROKRASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMU KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2022

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Managemen perubahan	1. Perencanaan Reformasi Birokrasi	1. Pembentukan tim reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju. Tim terdiri dari: 1. Tim Pengarah 2. Tim Pelaksana (8 area perubahan) 3. Tim Agen Perubahan 4. Tim Asesor	Surat keputusan tim reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju	√												
			2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan	1. Kegiatan <i>kick off</i> /pembangunan komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Mamuju;					√					√			

			melakukan perubahan mental	2. Meningkatkan disiplin seluruh jajaran pegawai dan pejabat yang meliuti disiplin pakaian dinas, disiplin jam kerja. Disiplin pelaksanaan tupoksi serta tugas lain yang diberikan dan munculnya inisiatif dari pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Mamuju	√		√		√		√		√		√		
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	1. Pemberian pegawai teiadan minimal satu kali dalam satu tahun;							√						
				2. Menurunnya angka pelanggaran disiplin pegawai;					√							√	
			2. Penyelenggaraan integritas di lingkungan kerja: a. Penandatanganan pakta integritas penyelenggara pemilu; b. Pelaporan LHKPN dan LHKPASN setiap tahun; c. Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan; d. Pembangunan zona integritas.	1. Persentase (%) penandatanganan pakta integritas baik anggota dan ASN;		√											
				2. Persentase (%) pelaporan LHKPN;	√												
				3. Persentase (%) pelaporan LHKASN;	√												

				4. Dokumen Laporan penanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi : a. Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan b. Surat Pernyataan bebas Benturan c. Kepentingan d. Deklarasi pencahangan Zona Integritas KPU Kabupaten Mamuju								√						
			3. Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Mamuju	1. Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Mamuju	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4. Pembangunan instrumen reward dan punishment yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik;	1. Tersedianya instrumen reward and punishment di lingkungan KPU Kabupaten Mamuju								√						

				2. Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Mamuju									√				
		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1. Melakukan monitoring pelaksanaan RB dan rencana aksi agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Mamuju;	1. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi RB dan rencana aksi agen perubahan											√		
			2. Melakukan evaluasi pelaksanaan RB dan RA agen perubahan melalui lembar kerja evaluasi unit (penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan unit)	1. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi RA agen perubahan di lingkungan kerja;						√							
				2. Terisinya lembar kerja evaluasi (LKE)						√							
			1. Melakukan pelaporan RA RB dan RA agen perubahan dilingkungan kerja kepada: a. Tim Pengarah; b. Tim Reformasi KPU melalui KPU Provinsi.	1. Tim RB KPU Provinsi menerima laporan: a. SK Tim RB, Tim Agen Perubahan dan Assesor b. Rencana Aksi tahunan RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan dilingkungan unit kerja; c. Lembar Kerja Evaluasi.						√							
				2. Tersedianya dokumen hasil tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di						√							

				lingkungan kerja serta pelaksanaan yang sudah di tindak lanjuti dari evaluasi sebelumnya.													
2	Penguatan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi kebijakan	Melakukan pendokumentasian produk hukum KPU RI;	Melakukan digitalisasi produk hukum KPU RI dan KPU Kabupaten Mamuju	Adanya aksesibilitas data perundang-undangan di KPU Kabupaten Mamuju	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Melakukan pengendalian dalam penyusunan produk hokum dilingkungan KPU Kabupaten Mamuju;	Menyusun SOP produk hukum	Tersusunnya produk hokum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Melakukan bedah produk hukum KPU RI	Melakukan pencermatan dan pembahasan produk hukum	Munculnya daftar inventarisasi masalah (DIM)									√	√	√	√	
		Pengelolaan JDIH	Pembuatan JDIH KPU Kabupaten Mamuju; Pengelolaan JDIH oleh satuan unit	Dapat di akses oleh setiap orang;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				Update data JDIH setiap ada peraturan perundang-undangan terbaru	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Penguatan kelembagaan	Penyesuaian struktur organisasi	Melakukan ketersediaan SDM sesuai kebutuhan dan tupoksi	Ketersediaan jumlah pegawai yang dibutuhkan pada KPU Kabupaten Mamuju	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Peningkatan pemahaman akan tupoksi pegawai	Menyusun dan menentukan target penyelesaian pekerjaan oleh atasan langsung serta mengevaluasi progresnya secara berkala	Tercapainya pekerjaan dan laporan yang memadai serta adanya kesigapan pegawai dalam melaksanakan tupoksi			√		√		√		√		√		

4	Penguatan tata laksana	Peningkatan tatalaksana proses kerja di KPU Kabupaten Mamuju	Menyusun SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di KPU kabupaten Mamuju	Tersusun dan terlaksananya SOP dalam setiap kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			Membuat dan meng-update plat form website dan social media resmi yang di gunakan di KPU Kabupaten Mamuju	Terbitnya SK KPU Kabupaten mamuju terkait platform website dan social media resmi KPU Kabupaten Mamuju											√		
		Menerapkan teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan kegiatan di KPU Kabupaten Mamuju	Melakukan pengisian data pada aplikasi yang berbasis online	Tersedianya aplikasi berbasis online dengan bai, benar dan sesuai target waktu yang telah ditetapkan serta dapat diakses datanya apa bila diperlukan, diantaranya: Sipaw, Siparmas, e-Monev, e-Lapkin, SMART, Simonika, Sakti (satu DJA), e-Rakon LK dan Sirup	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Menerapkan keterbukaan informasi	Melakukan penguatan PPID	Tersedianya struktur kepengurusan PPID dan terlaksananya pemenuhan terhadap permintaan informasi public serta tersedianya laporan pelaksanaan PPID	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			Melakukan pemilihan informasi yang bisa di share/dibagikan ke masyarakat	Tersedianya informasi publik(informasi yang wajib diumumkan secara terbuka, informasi berkala dan informasi yang terbaharuai) serta informasi non publik (informasi yang dikecualikan)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

			Meningkatkan publikasi kegiatan yang dilakukan di KPU Kabupaten Mamuju	Meningkatnya respon masyarakat kepada berita/kegiatan yang dilakukan di KPU Kabupaten Mamuju	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Tata Kelola dan implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) di lingkungan KPU Kabupaten Mamuju	Pemanfaatan aplikasi SPBE pada Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju: 1) Aplikasi Manajemen Kepegawaian; 2) Aplikasi Perencanaan; 3) Aplikasi Penganggaran; 4) Aplikasi Keuangan; 5) Aplikasi manajemen kinerja; 6) Aplikasi Pengadaan.	Persentase tercapainya implementasi SPBE pada Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			Pemanfaatan aplikasi SPBE pada pelayanan publik: 1) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum; 2) Layanan Kepemiluan; 3) Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).	Aplikasi dapat diakses dengan mudah dan lancar oleh publik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5	Tim penataan sistem manajemen SDM ASN	Meningkatkan kapasitas pegawai	Melaksanakan kegiatan knowledge sharing	Meningkatnya kemampuan pegawai, baik yang menunjang tupoksi maupun diluar tupoksi,		√			√				√			√	
		Pemilihan pegawai teladan/berprestasi	Melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai	Terpilihnya pegawai teladan secara tepat(objektif)								√					

		Profesionalisme ASN	Pembangunan jabatan fungsional di lingkungan satuan kerja	Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung unit satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6	Penguatan pengawaan	Melakukan sosialisasi dan internalisasi pengawasan intern	Sosialisasi dan internalisasi gratifikasi dan benturan kepentingan dalam unit kerja	Terlaksananya sosialisasi dan internalisasi gratifikasi dan benturan kepentingan dalam unit kerja				√									
			Menyampaikan pelaporan LHKPN dan LHKASN	Terpenuhinya pelaporan LHKPN dan LHKASN			√										
		Melakukan pembangunan sistem pengawasan intern	Pembentukan satuan tugas SPIP	Terbitnya SK satuan tugas SPIP	√												
			Melakukan kegiatan SPIP yang meliputi inventarisasi kegiatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan, inventarisasi dan verifikasi masalah internal serta penanganan penyelesaian tindak lanjut dari hasil pemeriksaan (Itjen, BPKP, BPK)	Penyampaian laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Penguatan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penyusunan dan penetapan Renstra satuan kerja	Tersedianya Renstra satuan unit	√					√							
			Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah program yang mendukung kinerja dan kegiatan serta terealisasinya anggaran pada TA berjalan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

		Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E-Lapkin; 2. Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas Kinerja:	1. Terisinya amplikasi E-Lapkin; 2. Pengelolaan PPBJ bersertifikat, pengelolaan perbendaharaan bersertifikat, PPSPM bersertifikat dan PPK Bersertifikat;						√						√	
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Menerapkan standar pelayanan data dan informasi	Menyusun dan mensosialisasikan SOP pelayanan data dan informasi	Tersusunnya dan terpublikasikannya SOP pelayanan data dan informasi					√				√	√	√	√	
			Memusatkan pelayanan data dan informasi pada PPID	Terpenuhinya permintaan informasi dan data secara cepat dan akurat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Mendorong partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	Menyelenggarakan pendidikan pemilih kepada masyarakat	Tersedianya dan terlaksananya layanan rumah pintar						√							
				Terfasilitasinya sosialisasi kepemiluan pada target-target yang menjadi sasaran Pendidikan pemilih							√	√	√	√	√	√	

			Penyediaan buku tamu, kotak saran dan aduan pada rumah pintar pemilu serta website	Tersedianya buku tamu dan kotak saran untuk menampung masukan, kritik dan saran dalam pelayanan rumah pintar dan website KPU Kabupaten Mamuju								√	√	√	√	√	√	
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	--

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 09 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Hukum

CAHYANING SUPYANTY

